



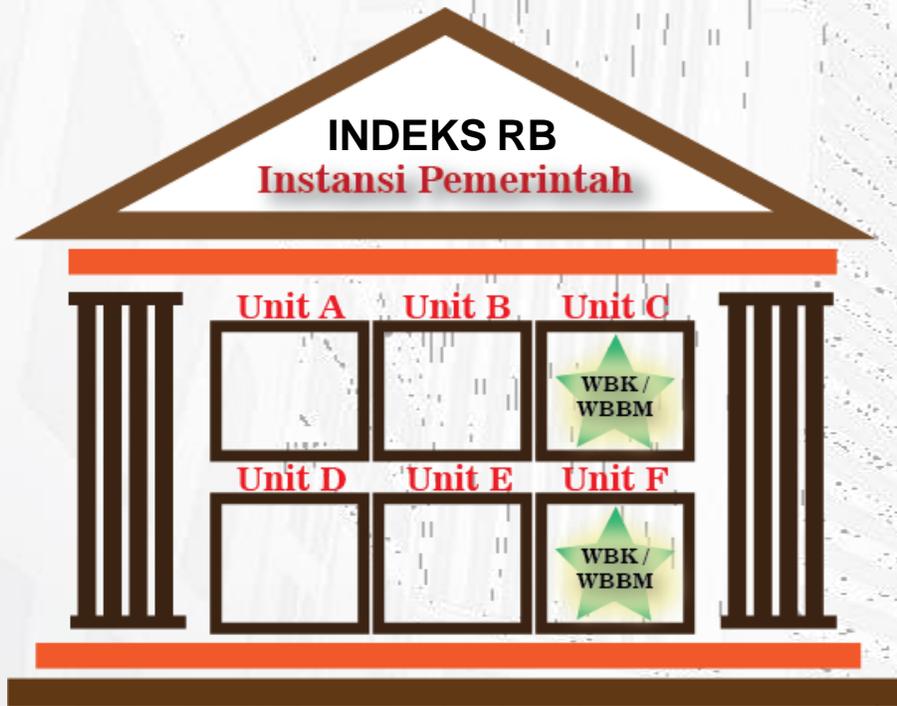
**PEMBANGUNAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK/WBBM**

ZI

- Hakekat pembangunan ZI
- Proses pembangunan ZI
- 5 langkah strategi membangun ZI
- Kerangka Logis ZI
- Stranas PK
- Perbedaan ZI Lama dan baru
 - Pengajuan ZI
 - Syarat Pengajuan
- Proses Penilaian dan penetapan WBK/WBBM
- Perkembangan pembangunan ZI
- PMPZI



HAKEKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBBM)



Unit Percontohan

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

Merupakan Miniatur Implementasi Reformasi Birokrasi di Unit Kerja

Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas

Membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan ZI

- Penandatanganan pakta integritas
- Pernyataan komitmen

Pengusulan ZI

- Penilaian mandiri oleh TPI
- Pengusulan ke Kementerian PANRB

Penetapan WBK/WBBM

- Panel TPN
- Kementerian PAN RB bersama KPK dan Ombudsman menetapkan bersama

Pembangunan ZI

- Menetapkan unit kerja
- Membangun dan melakukan monev atas pembangunan

Reviu oleh TPN

- Verifikasi di lapangan
- Survey oleh BPS



5 Langkah Strategi Membangun ZI

1



KOMITMEN

Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama

2



KEMUDAHAN PELAYANAN

Menyediakan Fasilitas Lebih Baik dan Semangat Hospitality untuk kepuasan publik

3



PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT

Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut

4



MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya

5

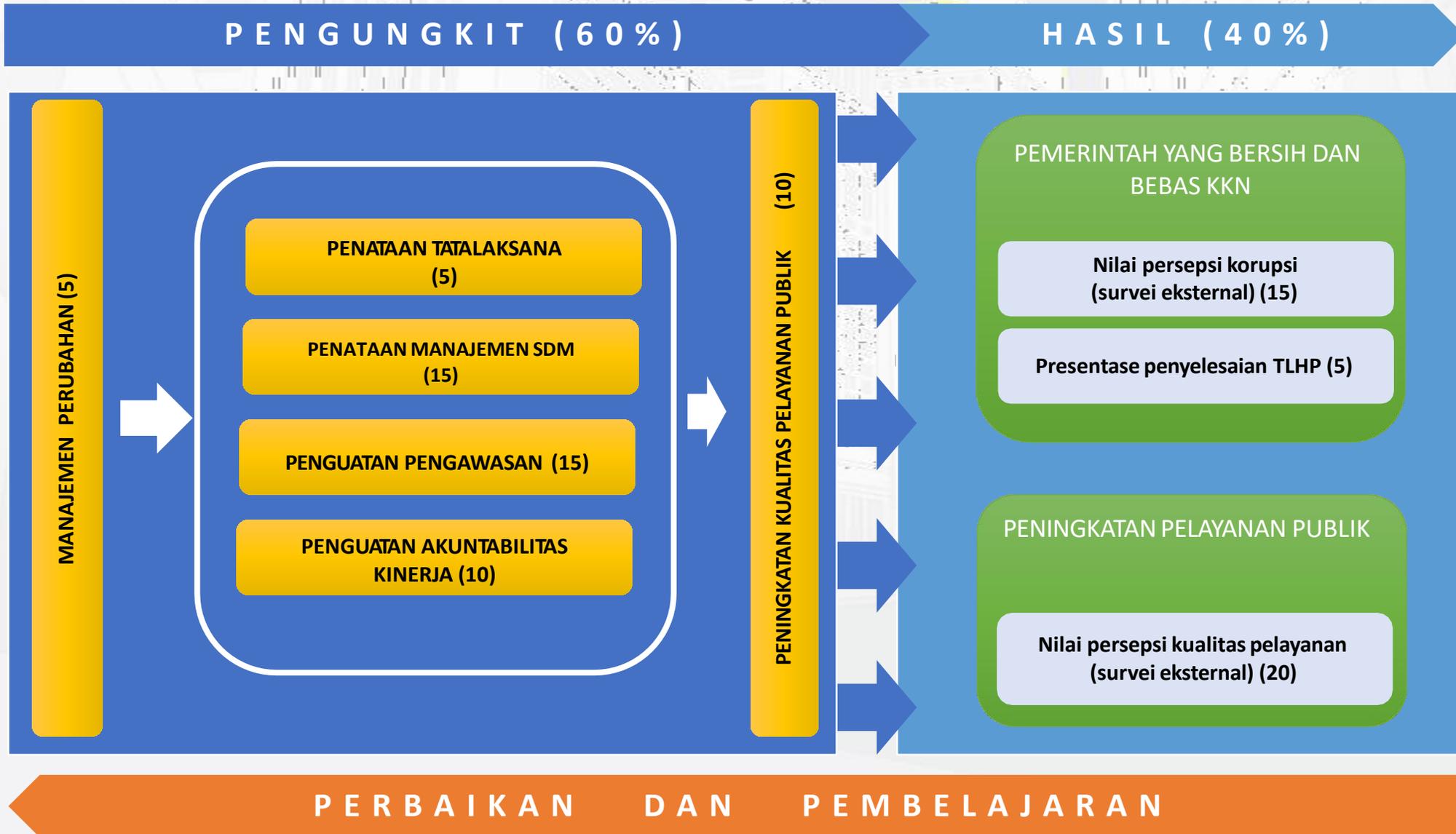


MANAJEMEN MEDIA

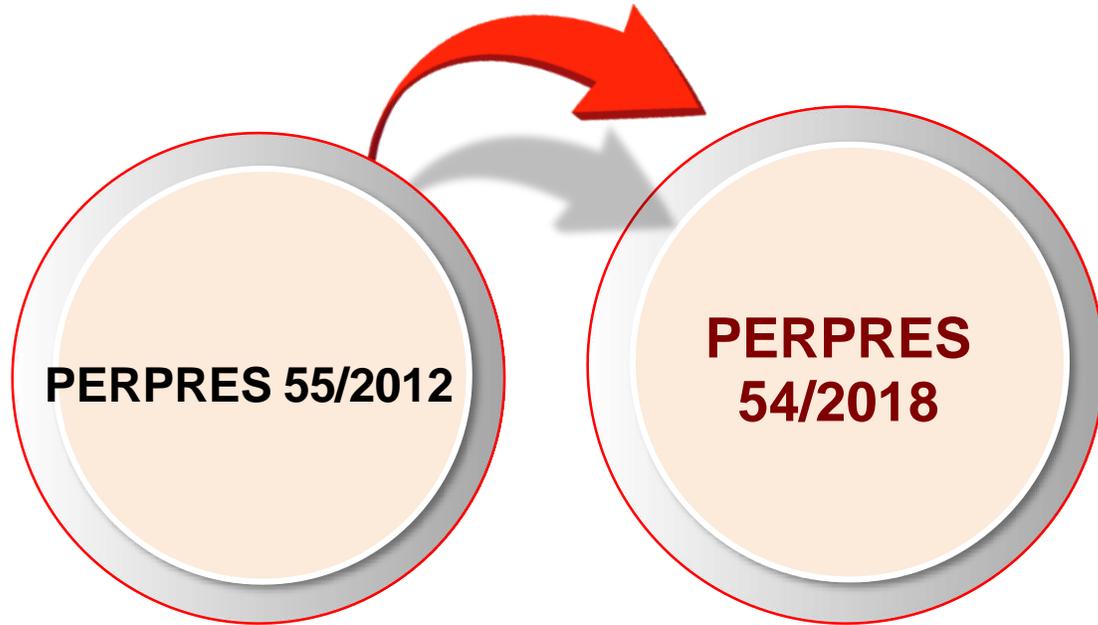
Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat

KERANGKA LOGIS

Pembangunan Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM

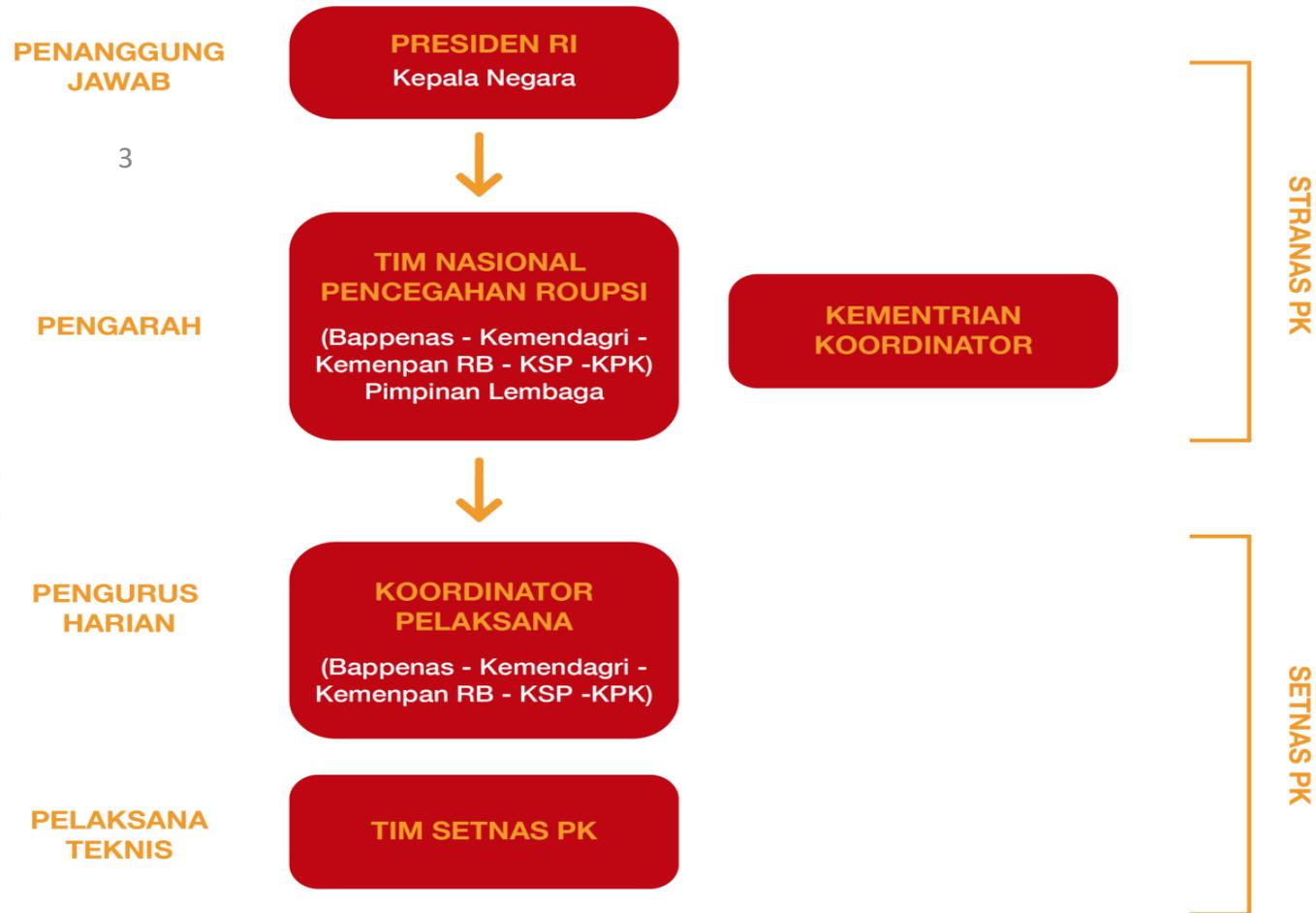


Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)



Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014

Strategi Nasional pencegahan korupsi



Tugas Timnas

1. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Stranas PK
2. Membuat **laporan** capaian pelaksanaan Stranas PK
3. **Mempublikasikan** laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



3 FOKUS

11 AKSI

1 PERIJINAN & TATA NIAGA

2 KEUANGAN NEGARA

3 PENEGAKAN HUKUM & REFORMASI BIROKRASI

- Aksi di K/L sebagai PJ
- Aksi di Daerah sebagai PJ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

- 1 Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
- 2 Perbaiki Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan
- 3 Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaiki Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi
- 4 Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
- 5 Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta
- 6 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
- 7 Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak
- 9 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 10 Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
- 11 Perbaiki Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana

AKSI
09

PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PENANGGUNG JAWAB

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Perhubungan
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Agama
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kejaksaan Agung
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Sosial

INTEGRITAS



OUTPUT

- 1 Terbangunnya unit-unit kerja percontohan (zona integritas) di setiap instansi pemerintah
- 2 Terbitnya MoU komitmen pembangunan Zona Integritas pada aparat penegak hukum dan Unit Pelayanan Strategis tertentu yakni Kantor Pertanahan Syahbandar, Lapas, Bea Cukai, Imigrasi, BNP2TKI, serta Unit Layanan Pendidikan
- 3 Terbentuknya Unit Pengendalian Integritas di sektor-sektor strategis

ZONA INTEGRITAS

SUB AKSI 2

- 1 Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- 2 Meningkatnya Standar Integritas Pemerintah pada sektor-sektor strategis



Mandiri

PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMA

Syarat Pengajuan Zona Integritas

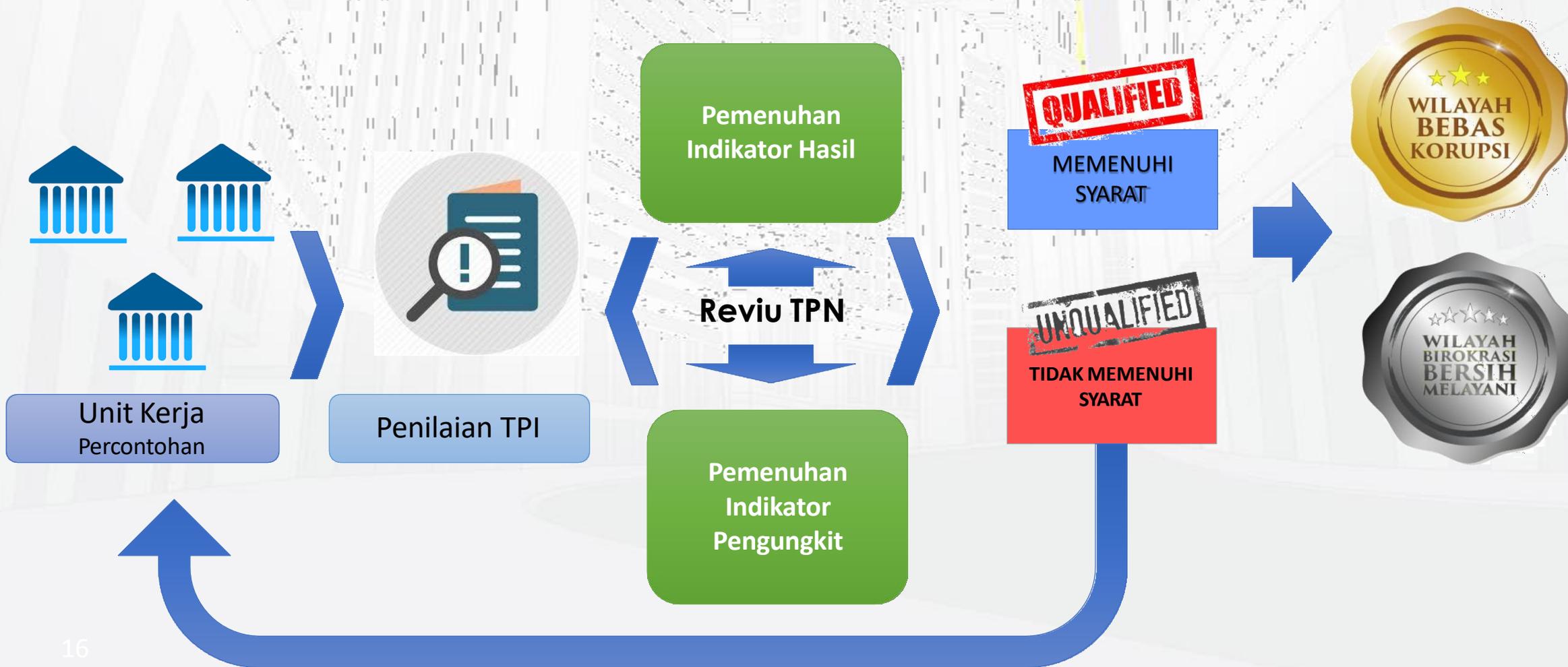
Permenpan
52/2014

Permenpan 10/2019

SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	Nilai AKIP minimal "B"	
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	LHKASN dan LHKPN 100%	

PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS





Mandatory



Mandiri

Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM

PERMENPANRB 52/2014

2019

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal	75	85
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18	18
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	13,5	13,5
Nilai sub-komponen "Persentasi TLHP" minimal	3,5	3,5
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	-	16

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18,50	18,88
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	13,5 (survey 3,60)	13,88 (survey 3,70)
Nilai sub-komponen "Persentasi TLHP" minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	15 (survey 3,00)	17 (survey 3,40)



Mandatory

Penetapan Kawasan Berpredikat WBK dan WBBM

ILUSTRASI

SYARAT	WBK	WBBM
Unit kerja	Semua unit kerja memenuhi kriteria predikat WBK	Semua unit kerja memenuhi kriteria WBBM
Skor Integrasi Proses Bisnis	6,5	7,5

Kondisi	Unit Kerja	Integrasi Kawasan	Penetapan
1	Tidak seluruh unit	Tidak ada integrasi	Tidak Memenuhi Kawasan WBK/WBBM
2	Tidak seluruh unit	Ada integrasi	Tidak Memenuhi Kawasan WBK/WBBM
3	Seluruh unit	Tidak ada Integrasi	Tidak Memenuhi Kawasan WBK/WBBM
4	Seluruh unit	Ada integrasi	Memenuhi Kawasan WBK/WBBM

INTEGRASI PROSES BISNIS



Terdapat peta proses bisnis pelayanan utama kawasan yang menggambarkan integrasi lintas unit kerja pada suatu kawasan;



Terdapat Monev pelaksanaan proses bisnis pelayanan utama yang dilakukan secara berkala;



Implementasi peta proses bisnis pelayanan utama ditindaklanjuti dengan pembuatan SOP di internal unit kerja;



Terdapat Monev pelaksanaan SOP turunan peta proses bisnis di internal unit kerja yang dilakukan secara berkala;



Terdapat sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja pada suatu kawasan



Selamat Datang



ID Pengguna

Sandi

Masuk Aplikasi

© 2018

ZONA Integritas Cari Formulir Keluar Aplikasi

Upload Dokumen

Tahun Anggaran: 2019

Choose File No file chosen Unggah

Daftar Evaluasi

Show 10 entries Search:

Nama file	Tahun Anggaran	Waktu Unggah	Pilihan
petunjuk_pemakaian_stonline.pdf	2018	Saturday, 09 February 2019	 
tes pdf.pdf	2019	Tuesday, 12 February 2019	 

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous **1** Next

Permohonan rewiu pembangunan ZI kepada TPN menggunakan PMP-ZI melalui alamat website www.pmpzi.menpan.go.id

Tujuan:
Mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal pengumpulan data, pengolahan data, evaluasi data, dan monitoring.

TERIMA KASIH



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

SIMPLICITY
IS THE SOUL OF
EFFICIENCY

- Austin Freeman